



JPD Tak Menjangkau Warga Miskin

**Dewan Dorong Perubahan Aturan
 Penerima Jaminan Pendidikan Daerah**

JOGIA - Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang digulirkan Pemkot Jogja tengah menghadapi tantangan. Berdasarkan temuan legislatif, program tersebut sering tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini karena data dasarnya berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Darini mengatakan, fenomena tersebut terjadi karena sistem dalam DTSEN membatasi akses JPD hanya untuk warga yang tercatat dalam desil satu hingga lima. Namun fakta di lapangan, justru menunjukkan ada warga yang secara riil berada dalam kondisi miskin. Namun malah masuk ke dalam kategori desil enam atau tujuh.

"Saat warga ini dalam posisi turun ekonomi, posisi desilnya masih tercatat tinggi karena belum ada perbaikan data," ujar Darini saat di sela rapat pembahasan perubahan regulasi JPD di Kantor DPRD Kota Jogja, kemarin (25/6).

Menurut Darini, sistem pendataan berbasis desil tersebut kurang menangkap dinamika ekonomi masyarakat yang bergerak cepat. Kondisi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat yang baru saja mengalami kemerosotan ekonomi struktural. Misalnya jika baru saja mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karenanya, Politisi Partai PDI Perjuangan ini mendorong agar ada perubahan regulasi di tingkat daerah. Ini agar bisa membuat masyarakat miskin di luar desil aturan pemerintah pusat dapat terjangkau program JPD.

Sejatinya perubahan data desil bisa diajukan. Namun, Darini menyebut aturan kementerian butuh waktu birokrasi minimal tiga

bulan untuk verifikasi. Bagi keluarga miskin yang sedang menghadapi masa krusial pendaftaran sekolah anak mereka, tentu waktu tersebut terlalu lama dan mengancam keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.

Melihat urgensi itu, legislatif dan eksekutif tengah menggelar serangkaian koordinasi maraton bersama kementerian dan dinas terkait. Muncul satu prinsip dasar, yakni pemkot harus hadir memberikan intervensi nyata bagi warga yang benar-benar membutuhkan. (Inu/wia/hep)



KAWAL: Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Darini saat ditemui di kantornya, kemarin (25/6). Dorong perubahan aturan penerima program JPD.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005